

KESENJANGAN UPAH BURUH TANI PEREMPUAN PADA SEKTOR PERTANIAN TANAMAN RIMPANG DI KOTA BATU

Mafatikha Azkiya Zuhda¹, Amanah Agustin²

^{1,2} Universitas Insan Budi Utomo Malang

azkiya.zuhda@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the mechanism of the occurrence of gender-based wage gap in rhizome farm workers in Batu City as well as criticize how "cigarette wages" legitimize economic discrimination against women workers. The great contribution of women farm workers to the economic sector has not been directly proportional to the welfare they get. Until now, the agricultural sector is still overshadowed by problems that are difficult to eliminate in the form of gender wage gaps. This research uses a qualitative approach that aims to explore in depth and understand lived experiences experienced directly with participatory observation techniques, in-depth interviews, and documentation. The research was carried out at one of the rhizome plant collectors in Batu City, East Java. The informants in this study were determined using purposive sampling techniques, with inclusion criteria: female farm workers who work in the post-harvest cleaning sector of rhizome crops in Batu City, male farm workers with the same line of work as comparative informants, wholesalers (buyers of land owners' crops) who have authority in determining informal wage policies. The results of the study show that there is a wage gap between female and male farm workers in the form of facilities for providing "cigarette wages" or compensation for physical cigarettes which are exclusively allocated to male workers. In practice, business owners provide daily food, drink, and cigarette rations. However, for female workers who are culturally non-smoking, there is no cash compensation or other goods as a substitute for the cigarette facility. Collectors unilaterally categorize men's work as legitimate "menial work" to get energy subsidies (in the form of cigarettes), while women's work is reduced to "allowance work" or simply to fill domestic leisure.

Keywords: Wage Gap, Women Farm Workers, Rhizome Plants

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme terjadinya kesenjangan upah berbasis gender pada buruh tani tanaman rimpang di Kota Batu sekaligus mengkritisi bagaimana "upah rokok" melegitimasi diskriminasi ekonomi terhadap buruh perempuan. Kontribusi besar buruh tani perempuan pada bidang ekonomi ini belum berbanding lurus dengan kesejahteraan yang mereka dapat. Hingga saat ini sektor pertanian masih dibayangi persoalan yang sulit dihilangkan berupa kesenjangan upah gender. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk mengeksplorasi secara mendalam dan memahami pengalaman hidup yang dialami langsung dengan teknik observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Penelitian dilaksanakan di salah satu tempat pengepul tanaman rimpang di Kota Batu, Jawa Timur. Informan dalam penelitian ini ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, dengan kriteria inklusi: buruh

tani perempuan yang bekerja pada sektor pembersihan pasca-panen tanaman rimpang di Kota Batu, buruh tani laki-laki dengan lini pekerjaan yang sama sebagai informan pembanding, pemborong (pembeli hasil panen pemilik lahan) yang memiliki otoritas dalam menentukan kebijakan pengupahan informal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya kesenjangan upah buruh tani perempuan dan laki-laki berupa fasilitas pemberian "upah rokok" atau kompensasi rokok fisik yang secara eksklusif hanya dialokasikan kepada buruh laki-laki. Dalam praktiknya, pemilik usaha menyediakan jatah makan, minum, dan rokok harian. Namun, bagi buruh perempuan yang secara kultural tidak merokok, tidak ada kompensasi tunai maupun barang lain sebagai pengganti fasilitas rokok tersebut. Pengepul melakukan kategorisasi sepihak dengan melabeli pekerjaan laki-laki sebagai "kerja kasar" yang sah untuk mendapatkan subsidi energi (berupa rokok), sedangkan pekerjaan perempuan direduksi sebagai "pekerjaan tunjangan" atau sekadar pengisi waktu luang domestik.

Kata Kunci: *Kesenjangan Upah, Buruh Tani Perempuan, Tanaman Rimpang*

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara agraris yang dalam pembangunannya pemerintah Indonesia menitikberatkan pada sektor pertanian. Sebagian besar masyarakat Indonesia yang tinggal di pedesaan beratapencarian pada sektor pertanian yang mana sektor pertanian menjadi pilar utama perekonomian di Indonesia yang sangat bergantung pada kontribusi tenaga kerja intensif, di mana buruh tani perempuan memiliki peran esensial. Di Kota Batu, Jawa Timur, sektor pertanian menyerap banyak tenaga kerja hingga mencapai 36.055 jiwa, dengan rincian 23.723 tenaga kerja laki-laki dan 12.332 tenaga kerja perempuan (Trisdianawati, 2016). Perempuan sangat terlihat jelas

dilibatkan pada komoditas tanaman hortikultural dan tanaman rimpang (seperti jahe, kunyit, dan kencur) yang menjadi produk unggulan di wilayah pegunungan.

Kontribusi besar buruh tani perempuan pada bidang ekonomi ini belum berbanding lurus dengan kesejahteraan yang mereka dapat. Hingga saat ini sektor pertanian masih dibayangi persoalan yang sulit dihilangkan berupa kesenjangan upah gender (*gender wage gap*). Data nasional yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2025 menjelaskan rata-rata upah yang didapat oleh buruh tani laki-laki berada di angka Rp3,37 juta, sedangkan buruh perempuan masih tertinggal jauh dengan rata-rata upah sebesar Rp2,61 juta perbulan

(Tempo, 2025). Ketimpangan struktural ini semakin parah dengan kuatnya budaya patriarki dan absennya regulasi pengupahan yang ketat pada sektor informal di pedesaan. Struktur sosial dalam masyarakat yang bergantung pada pertanian cenderung memperkuat pandangan yang bias terhadap gender dengan menjadikan laki-laki sebagai pencari nafkah utama. Sementara itu, pekerjaan perempuan sering kali dianggap hanya sebagai penghasilan tambahan, yang pada akhirnya membuat eksploitasi upah terhadap perempuan menjadi hal yang biasa (Setiawan, 2017).

Melalui observasi dan wawancara yang dilakukan pada sektor pertanian tanaman rimpang di Kota Batu terkonfirmasi secara spesifik adanya disparitas upah riil pada jenis pekerjaan dengan beban kerja yang identik. Buruh tani perempuan dan laki-laki dialokasikan sama untuk melakukan pekerjaan pembersihan tanaman rimpang pasca panen yaitu membersihkan serabut dan sisa-sisa tanah yang melekat di tanaman rimpang. Walaupun demikian, adanya perbedaan hak upah informal di lapangan yang dimana buruh laki-laki menerima

insentif tambahan dalam bentuk “upah rokok”, sedangkan buruh perempuan tidak menerima kompensasi tambahan apapun. Hal ini menunjukkan bahwa upah akhir tidak berdasarkan produktivitas kerja yang objektif melainkan berdasarkan pada identitas gender dan kebutuhan kultural maskulin (merokok) yang dinormalisasikan oleh pengupah (Azarine, 2022).

Penelitian terdahulu pada sektor pertanian mengenai *gender wage gap* umumnya hanya berfokus pada perbedaan upah yang dipicu oleh perbedaan jenis golongan pekerjaan yang didominasi oleh pekerja laki-laki (seperti mencangkul) dianggap lebih tinggi daripada upah yang didominasi oleh pekerja perempuan (seperti menanam dan menyiang) (Kustini, 2021). Kebaruan (novelty) dari penelitian ini terletak pada kefokusannya analisis untuk membedah eksistensi kesenjangan upah pada jenis pekerjaan yang sama, yang memicu adanya instrumen tunjangan informal berbasis kultural patriarki berupa “upah rokok”. Menggunakan perspektif feminis, fenomena ini akan dianalisis secara kritis untuk membongkar bagaimana terinternalisasinya bias gender dalam

relasi pekerjaan informal di pedesaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme terjadinya kesenjangan upah berbasis gender pada buruh tani tanaman rimpang di Kota Batu sekaligus mengkritisi bagaimana "upah rokok" melegitimasi diskriminasi ekonomi terhadap buruh perempuan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk mengeksplorasi secara mendalam dan memahami pengalaman hidup yang dialami langsung (*lived experience*) yang dialami oleh buruh tani perempuan mengenai fenomena kesenjangan upah di sektor pertanian tanaman rimpang (Madihah et al., 2026). Dengan pandangan fenomenologi, peneliti tidak hanya melihat ketimpangan upah sebagai angka statistik, melainkan berusaha mengurai bagaimana para buruh perempuan mengalami, merasakan, dan memaknai praktik pemberian "upah rokok" kepada buruh laki-laki sebagai bentuk marginalisasi gender dalam keseharian kerja mereka (Aflah & Murhayati, 2025).

Penelitian ini dilaksanakan di kawasan sentra pertanian hortikultural khususnya tanaman rimpang di Kota Batu, Jawa Timur. Peneliti bertindak sebagai instrumen utama (*human instrument*) yang hadir langsung di lapangan untuk membangun kedekatan (*rapproch*) dengan subjek penelitian. Informan dalam penelitian ini ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, dengan kriteria inklusi: buruh tani perempuan yang bekerja pada sektor pembersihan pasca-panen tanaman rimpang di Kota Batu, buruh tani laki-laki dengan lini pekerjaan yang sama sebagai informan pembanding, pemborong (pembeli hasil panen pemilik lahan) yang memiliki otoritas dalam menentukan kebijakan pengupahan informal.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama: observasi partisipatif, wawancara mendalam (*in-depth interview*), dan dokumentasi. Observasi partisipatif dilakukan dengan mengamati langsung interaksi dan ritme kerja di lokasi pembersihan rimpang. Wawancara mendalam dilakukan secara tatap muka (*one to one interview*) untuk menggali aspek emosional, penerimaan dan rasa ketidakadilan (Heriyanto, 2018).

Seluruh proses wawancara direkam atas persetujuan informan (*informed consent*) dan disajikan dalam bentuk transkrip verbatim.

Analisis data dilakukan secara sirkular mengacu pada tahapan Interpretative Phenomenological Analysis (IPA). Menurut (Alase, 2017) teknik analisis IPA ini meliputi beberapa tahap diantaranya: membaca ulang transkrip wawancara secara berulang untuk memahami alur berpikir informan, melakukan pencatatan awal (*initial noting*) terhadap frasa-frasa penting, menyusun tema-tema umum yang muncul terkait praktik "upah rokok" dan kesenjangan gender, mencari relevansi dan menghubungkan tema-tema tersebut ke dalam struktur konseptual feminisme, dan melakukan konseptualisasi hasil dalam bentuk narasi deskriptif-analitis. Untuk menjaga keabsahan data (*trustworthiness*), peneliti menerapkan teknik triangulasi sumber untuk membandingkan kesaksian buruh perempuan, buruh laki-laki, dan pengepul, serta triangulasi teknik untuk mengonfrontasi hasil wawancara dengan data hasil observasi langsung di lapangan (Arianto, 2024).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Anatomi Beban Kerja dan Profil Sosio-Demografis Buruh Tani Rimpang

Ketidakadilan upah bukan sekedar urusan yang membicarakan perbandingan upah, melainkan mengamati bagaimana orang-orang yang berperan didalamnya. Dengan begitu, membutuhkan pendekatan dengan para buruh tani tanaman rimpang untuk melihat bagaimana kesenjangan ini bisa terjadi. Agar dapat melihat potret kerentanan sosio-ekonomi buruh tani perempuan dan juga membandingkan karakteristik buruh tani laki-laki pada komoditas yang sama perlu dilakukan pemetaan karakteristik demografis.

Berdasarkan hasil wawancara di lapangan pengepul tanaman rimpang yang sekaligus pemilik otoritas pengupahan (yang didominasi komoditas jahe, kunyit, temulawak, dan kunci) di wilayah yang dikelola oleh bapak Mu'minin, seorang pengepul/pemborong berusia 32 tahun asal Lebo Madiredo, Pujon, yang telah menekuni selama kurang lebih 10

tahun. Beliau mempekerjakan buruh harian dalam roda operasionalnya dengan profil sosio-demografis yang sangat kontras dari segi usia, latar belakang, dan motivasi kerja.

Pada buruh tani perempuan, peneliti mewawancarai Ibu Nurul Hidayah, seorang buruh perempuan berusia 45 tahun asal Lebo Madiredo, Pujon dan sudah bekerja kurang lebih satu tahun di sektor pertanian tanaman rimpang. Kehadiran beliau pada sektor informal ini mencerminkan kerentanan ekonomi pekerja perempuan paruh baya di pedesaan. Beliau mengaku terpaksa menjalankan pekerjaan ini karena usaha yang beliau jalankan sebelumnya yaitu membuat jamu sepi di pasaran akibat musim hujan sehingga memaksa beliau beralih profesi demi menyambung hidup keluarga ketimbang menganggur di rumah. Kondisi ini sejalan dengan sosiologi pedesaan bahwa sektor pertanian sering menjadi jaringan pengaman ekonomi (*safety net*) bagi perempuan kelas bawah saat sektor domestik mereka runtuh (Suswadi, 2020).

Ketika pembedahan cara pembagian kerja (*sexual division of labor*) terjadi di lokasi kerja pembersihan tanaman rimpang mulai muncul ketimpangan struktural. Pengepul secara sadar membagi wilayah kerja yakni laki-laki dialokasikan untuk melakukan pekerjaan yang dianggap kerjaan kasar, seperti mencabut tanaman rimpang di lahan dan mencangkul, sedangkan perempuan ditempatkan pada proses akhir yang disebut “pritis” yaitu mengumpulkan hasil panen, membersihkan sisa tanah pada tanaman rimpang, dan memotong serabut akar tanaman rimpang, namun beberapa buruh laki-laki juga bekerja pada bidang ini juga ketika sudah menyelesaikan pekerjaan di lahan.

Kedua kelompok tersebut memiliki durasi jam kerja yang hampir sama dalam sehari. Ibu Nurul menghabiskan waktu untuk bekerja mulai dari pukul 07.00 hingga 16.00, sementara Adi juga bekerja mulai pukul 07.00 hingga 16.30. Terlihat jelas dari anatomi beban kerja ini meskipun jenis aktivitas fisiknya berbeda, baik buruh laki-laki maupun buruh

perempuan sama-sama dituntut komitmen ketelitian, waktu, dan ketahanan fisik yang setara. Pemisahan jenis kerja ini mengonfirmasi teori segregasi kerja sektoral, di mana kerja perempuan sering kali distereotipkan sebagai pekerjaan yang lebih "halus" sehingga secara kultural dilegitimasi untuk dihargai lebih murah daripada kerja maskulin laki-laki (Maulidia, 2021).

2. Praktik "Upah Rokok" dan Mekanisme Diskriminasi Upah Informal

Memasuki ranah tata kelola ekonomi informal pedesaan, standarisasi pengupahan sering menggunakan konvensi sosial yang bias gender dan tidak didasarkan pada regulasi hukum yang kaku. Tempat pembersihan tanaman rimpang milik pengepul yakni Bapak Mu.minin, manifestasi ketimpangan ekonomi secaranya nyata terjadi melalui nominal upah harian yang timpang. Berdasarkan data lapangan, upah bersih yang diterima oleh buruh perempuan seperti Ibu Nurul Hidayah hanyalah sebesar Rp75.000 per hari. Nominal ini terpaut jauh jika dibandingkan dengan pendapatan

buruh laki-laki seperti Adi yang menerima upah harian sebesar Rp100.000 untuk pekerjaan pembersihan di rumah pengepul dan untuk buruh laki-laki yang bekerja di lahan upahnya mencapai Rp110.000 per hari. Selisih atau gender wage gap riil yang tercipta di lapangan berkisar antara Rp25.000 hingga Rp30.000 per hari kerja, buruh laki-laki menganggap hal tersebut lumrah karena mereka beranggapan kalau pekerjaan laki-laki lebih cepat dan lebih mendapatkan banyak hasil di bandingkan dengan pekerjaan buruh perempuan. seperti yang dikatakan Adi salah satu buruh laki-laki:

“Ada perebedaan upah antara buruh perempuan dan laki-laki kurang lebih sekitar 30.000, ya karna kebanyakan hasil kerjanya lebih banyak laki-laki”

Ketimpangan ini diperparah dengan adanya instrumen diskriminasi fasilitas berupa pemberian "upah rokok" atau kompensasi rokok fisik yang secara eksklusif hanya dialokasikan kepada buruh laki-laki. Dalam praktiknya, pemilik usaha menyediakan jatah makan, minum,

dan rokok harian. Namun, bagi buruh perempuan yang secara kultural tidak merokok, tidak ada kompensasi tunai maupun barang lain sebagai pengganti fasilitas rokok tersebut. Kebijakan informal ini ditegaskan oleh Bapak Mu'minin yang menyatakan:

“Rokok hanya untuk laki laki, yang dominan diperuntukan untuk kerjaan kasar kalau perempuan kepekerja tunjangan”

Sebuah pembenaran berbasis gender (*gendered rationalization*) terkuak dengan pernyataan tersebut. Pengepul melakukan kategorisasi sepihak dengan melabeli pekerjaan laki-laki sebagai "kerja kasar" yang sah untuk mendapatkan subsidi energi (berupa rokok), sedangkan pekerjaan perempuan direduksi sebagai "pekerjaan tunjangan" atau sekadar pengisi waktu luang domestik. Paradoksnya, secara durasi dan intensitas, kedua kelompok pekerja ini mengorbankan waktu produktif yang setara, di mana buruh perempuan menghabiskan waktu dari pukul 07.00 hingga 16.00 WIB demi menyelesaikan tumpukan komoditas jahe yang sama.

Eksklusivitas jatuh rokok ini secara sosiologis memperlihatkan bagaimana terinternalisasikannya budaya patriaki pedesaan ke dalam sistem kapitalisasi informal. Dalam buku *Antara Maskulinitas dan Femininitas Perlawanan Terhadap Gender Order* (Udasmoro & Rahmawati, 2021) menjelaskan bahwa nilai ekonomi dari tenaga kerja tidak pernah ditentukan secara netral, melainkan dibentuk oleh definisi kultural tentang maskulinitas dan femininitas. Rokok dalam konteks ini dinormalisasi sebagai "kebutuhan biologis-kultural" yang melekat pada pekerja laki-laki agar mereka tetap produktif. Dengan memasukkan rokok ke dalam komponen biaya produksi, pemilik modal secara tidak langsung telah menaikkan nilai ekonomi buruh laki-laki atas beban buruh perempuan.

Ketimpangan struktural semacam ini mengonfirmasi temuan (Holilah, 2019) yang menyatakan bahwa di dalam pasar kerja pertanian informal, pengupahan kerap kali tidak mencerminkan produktivitas riil objektif, melainkan representasi dari relasi kuasa gender di mana

kebutuhan kelompok maskulin selalu diprioritaskan untuk diakomodasi. Absennya kompensasi pengganti bagi buruh perempuan yang tidak merokok memvalidasi terjadinya marginalisasi ekonomi yang sistemis, di mana buruh perempuan dipaksa menerima pendapatan yang lebih rendah mutlak karena identitas gender mereka.

3. Pemaknaan Lived Experience Buruh Perempuan dan Rasionalisasi Patriarki Pengepul

Tujuan dari pendekatan fenomenologi adalah untuk menggali bagaimana subjek memaknai realitas yang mereka alami di kehidupan sehari-hari (Tarumingkeng, 2024). Dalam konteks kesenjangan upah pengalaman hidup di tempat kerja buruh tani perempuan sektor tanaman rimpang membongkar adanya pergulatan batin antara pasrah menerima dan kesadaran akan terjadinya ketidakadilan. Ibu Nurul, salah satu narasumber buruh tani perempuan secara jujur menyuarkan isi hatinya atas rasa tidak nyaman yang dialami selama bekerja serta pandangannya mengenai bagaimana jerih payah

perempuan sering dipandang sebelah mata dalam sistem pengupahan harian. Beliau menuturkan kisah hidupnya:

“Ya dibuat puas ya puas karna ngak ada pilihan lain. Kadang ya ngerasa nggak nyaman kan banyak laki laki disini, pekerjaan nya itu lebih mahal. perempuan kan walaupun pekerjaannya bisa seperti laki laki kan nggak ada harganya dibanding laki laki...”

Rasionalisasi dari pengepul ini sangat tepat dibedah menggunakan subordinasi gender yang dirumuskan sosiolog feminis, Sylvia Walby dalam bukunya *Theorizing Patriarchy*. Dalam buku tersebut menjelaskan bahwa salah satu struktur patriarki yang paling kuat beroperasi adalah dalam ranah kerja upahan (Sanauddin, 2025). Pemilik modal masih cenderung menormalisasikan pemikiran pencari nafkah utama (*male breadwinner illusion*) sebagai alasan mengapa laki-laki berhak atas upah dan fasilitas rokok yang lebih tinggi, sekaligus menganggap peran perempuan hanyalah domestik sebagai sampingan atau tunjangan yang tidak perlu di

pedulikan hak akan kesejahteraan secara utuh.

Pelabelan “hasil kerja laki-laki lebih banyak” tanpa adanya bukti indikator timbangan yang objektif merupakan bentuk ketimpangan akan evaluasi kerja yang bias gender. Sebagaimana dianalisis oleh (Fakih, 2016) dalam bukunya *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, masyarakat yang memegang budaya patriaki cenderung otomatis melabeli apapun yang dikerjakan oleh laki-laki dengan status sosial dan nilai yang lebih tinggi. Melalui kedok tradisi informla “upah rokok” dan standarisasi yang subjektif ini, bias gender bukan hanya dilenggangkan sebagai prasangka, akan tetapi telah berwujud menjadi bentuk eksploitasi ekonomi nyata terhadap buruh tani perempuan pada sektor tanaman rimpang di Kota Batu.

D. Kesimpulan

Memasuki ranah tata kelola ekonomi informal pedesaan, standarisasi pengupahan sering menggunakan konvensi sosial yang bias gender dan tidak didasarkan pada regulasi hukum yang kaku.

Manifestasi ketimpangan ekonomi secaranya nyata terjadi melalui nominal upah harian yang timpang. Ketimpangan ini diperparah dengan adanya instrumen diskriminasi fasilitas berupa pemberian "upah rokok" atau kompensasi rokok fisik yang secara eksklusif hanya dialokasikan kepada buruh laki-laki. Eksklusivitas jatah rokok ini secara sosiologis memperlihatkan bagaimana terinternalisasikannya budaya patriaki pedesaan ke dalam sistem kapitalisasi informal. Pemilik modal masih cenderung menormalisasikan pemikiran pencari nafkah utama (male breadwinner illusion) sebagai alasan mengapa laki-laki berhak atas upah dan fasilitas rokok yang lebih tinggi, sekaligus menganggap peran perempuan hanyalah domestik sebagai sampingan atau tunjangan yang tidak perlu di pedulikan hak akan kesejahteraan secara utuh. Pelabelan “hasil kerja laki-laki lebih banyak” tanpa adanya bukti indikator timbangan yang objektif merupakan bentuk ketimpangan akan evaluasi kerja yang bias gender.

DAFTAR PUSTAKA

- Aflah, F. R., & Murhayati, S. (2025). *Penelitian Fenomenologis*. 9, 13099–13109.
- Alase, A. (2017). The Interpretative Phenomenological Analysis (IPA): A Guide to a Good Qualitative Research Approach. *International Journal of Education and Literacy Studies*, 5, 9. <https://doi.org/10.7575/aiac.ijels.v.5n.2p.9>
- Arianto, B. (2024). *Triangulasi Metoda Penelitian Kualitatif*. <https://doi.org/10.70310/q81zdh33>
- Azarine, F. (2022). Kesenjangan Upah Buruh Tani: Kajian Pengaruh Modal Manusia dan Perlakuan Diskriminatif terhadap Buruh Tani. *Doctoral Dissertation, Universitas Gadjah Mada*. <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/210538>
- Fakih, M. (2016). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Insist Press. http://103.44.149.34/elib/assets/buku/Analisis_Gender_dan_Transformasi_Sosial-1.pdf
- Heriyanto, H. (2018). Thematic Analysis sebagai Metode Menganalisa Data untuk Penelitian Kualitatif. *Anuva*, 2(3), 317. <https://doi.org/10.14710/anuva.2.3>
- Holilah. (2019). *Perbedaan Upah Buruh Tani Antara Laki-laki dan Perempuan Menurut Perspektif Keadilan Gender Studi Kasus di Desa Gugul Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan* [IAIN Madura]. https://opacperpus.uinmadura.ac.id/index.php?p=show_detail&id=179
- Kustini. (2021). *Perempuan, Keluarga, dan Perubahan Sosial*. <https://doi.org/10.55981/brin.458>
- Madiah, H., Pratiwi, E., Wahyuni, A., & Yuridka, F. (2026). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yayasan Putra
- Adi Dharma.
- Maulidia, H. (2021). Perempuan dalam Kajian Sosiologi Gender: Konstruksi Peran Sosial, Ruang Publik, dan Teori Feminis. *Journal of Politics and Democracy*, 1, 71–79. <https://doi.org/10.61183/polikrasi.v1i1.6>
- Sanauddin, N. (2025). Walby's Theory of Patriarchy: A Critical Review in the Context of Pakistan. *Social Science Review Archives*, 3, 950–959. <https://doi.org/10.70670/sra.v3i2.685>
- Setiawan, E. (2017). Konstruksi Sosial Pembagian Kerja Dan Pengupahan Buruh Tani. *YINYANG: Jurnal Studi Islam, Gender Dan Anak*, 12(1), 19–34. <https://doi.org/10.24090/yinyang.v12i1.2017.pp19-34>
- Suswadi. (2020). *Sosiologi Pertanian*. Ziyad Books.
- Tarumingkeng, R. (2024). *Fenomenologi* (Issue January). <https://rudycr.com/ab/Fenomenologi.pdf>
- Tempo. (2025). BPS Rilis Upah Rata-rata Pekerja Rp 3,09 Juta: Gaji Perempuan Tertinggal. *Tempo.Co*. <https://www.tempo.co/ekonomi/bps-rilis-upah-rata-rata-pekerja-rp-3-09-juta-gaji-perempuan-tertinggal>
- Trisdianawati, M. S. R. (2016). *Peran Buruh Wanita terhadap Kesejahteraan Keluarga di Agrowisata Petik Stroberi Dusun Pandan Desa Pandanrejo Kecamatan Bumiaji Kota Batu*. https://repository.ub.ac.id/id/eprint/4/Jurnal_Publikasi_Skripsi.pdf
- Udasmoro, W., & Rahmawati, A. (2021). *Antara Maskulinitas dan Femininitas Perlawanan Terhadap Gender Order*. Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada.